

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO

*by Siti Marwiyah*

---

**Submission date:** 15-Jun-2022 03:59AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 1857225243

**File name:** ERAH\_DALAM\_PENGELOLAAN\_PASAR\_TRADISIONAL\_DI\_KOTA\_PROBOLINGGO.pdf (286.12K)

**Word count:** 3431

**Character count:** 24136

4  
**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO**

Oleh

16 Alifia Maulidin<sup>1)</sup>, Siti Marwiyah<sup>2)</sup>, Avita Khoirunnafiyah<sup>3)</sup>

1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca  
Marga<sup>23</sup> obolinggo

Email: [alifiamauld@gmail.com](mailto:alifiamauld@gmail.com), [marwiyah@upm.ac.id](mailto:marwiyah@upm.ac.id), [avitakhoirunnafiyah@gmail.com](mailto:avitakhoirunnafiyah@gmail.com)

4  
**Abstrak**

Kondisi pasar tradisional di Kota Probolinggo dinilai tidak nyaman untuk pedagang dan konsumen. Banyak bagian fisik bangunan yang mengalami kerusakan, kekurangan sampah selokan yang sudah ditutup, penerangan kurang dan banyaknya pedagang yang berjualan di balai karena mereka tidak mendapatkan warung. Kendaraan yang parkir di sekitar pasar juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas kendaraan milik pedagang dan pembeli yang keluar atau masuk pasar. Kondisi pasar seperti yang digambarkan di atas, khususnya di pasar Baru Kota Probolinggo perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak terutama pemangku kepentingan pasar dan khususnya dari pemerintah daerah seperti Pengelola. Padahal pemerintah daerah telah berupaya memberdayakan Pasar Baru sebagai pasar yang <sup>20</sup>daya saing pasar tradisional, hasilnya belum mampu menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sesuai dengan kesesuaiannya karakteristik sosial pedagang dan pengunjung pasar tradisional. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat lokal Pemerintah Kota Probolinggo tetap perlu meningkatkan perhatiannya dalam membenahan pasar Baru pengelolaan. Perhatian tersebut harus mempertimbangkan [1] Urgensi peningkatan kebersihan lingkungan pasar, [2] urgensi penataan ulang parkir untuk mengatasi kemacetan, [3] urgensi revitalisasi fisik bangunan agar wujud fisik bangunan sebagai pasar modern, [4] urgensi revitalisasi arsitektur tata letak pasar yang komprehensif.

**Kata kunci: Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah, Manajemen, Pasar Tradisional**

**PENDAHULUAN**

Pengelolaan pasar di Kota Probolinggo belum ada suatu sistem pengelolaan pasar tradisional yang baik sehingga berdampak pada ketidakterdayaan para pelaku usaha dipasar tradisional akibat dari semakin kuatnya pengembangan pasar modern. Pengembangan pasar modern di Kota Probolinggo sangat berpengaruh terhadap pasar tradisional. Hal ini karena pasar modern menyediakan fasilitas yang nyaman, area yang bersih dan penataan zonasi yang baik sehingga pembeli sangat mudah menemukan berbagai kebutuhannya. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan pasar tradisional yang justru sebaliknya. Kondisi pasar tradisional yang ada di Kota Probolinggo dianggap tidak nyaman untuk pedagang dan para konsumen. Fisik bangunan pasar kurang, sudah rusak, kurangnya tempat sampah, saluran limbah yang telah tertutup, kurangnya pencahayaan dan

banyaknya pedagang yang berjualan di lorong karena tidak mendapatkan bedak. Keberadaan pedagang tersebut mengganggu kelancaran akses distribusi dan lalu lintas pengunjung atau pembeli. Hal ini tentu mengurangi daya tarik pengunjung untuk berbelanja di pasar tradisional. Parkiran sekitar pasar juga telah mengakibatkan kemacetan kendaraan yang melintas maupun kendaraan milik pedagang dan pembeli yang menuju atau meninggalkan pasar. Kondisi pasar di atas, khususnya pasar Baru kota Probolinggo perlu mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak khususnya stakeholder pasar dan pemerintah daerah sebagai pengelola. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memberdayakan pasar Baru sebagai pasar tradisional yang kompetitif, namun hasilnya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada secara nyata. Berdasarkan fenomena sebagaimana diuraikan dalam latar belakang maka rumusan

1  
ISSN

masalah penelitian ini adalah “ Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional yang ada di Kota Probolinggo.”

## LANDASAN TEORI

### 1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional

Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Marcel Seran. 2014) bahwa dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pemerintah bertindak sebagai regulator. Untuk itu Pemerintah Kota Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.

### 2. Kebijakan Pemerintah Dalam menjaga Eksistensi Pasar Tradisional

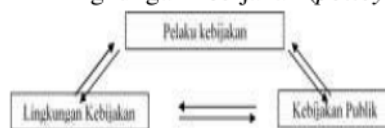
Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar tradisional sebenarnya sudah mulai nampak dengan adanya wacana-wacana tentang penertiban pasar-pasar tradisional agar bisa tertata rapi sehingga nyaman untuk masyarakat, namun wacana tersebut belum bisa berjalan maksimal, karena pada kenyataannya pasar-pasar tradisional yang ada sekarang keadaannya justru masih banyak yang tidak terurus, sehingga kesan pasar tradisional yang kumuh, bau, tidak terawat masih terngiang dalam benak masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih pergi ke pasar-pasar modern yang terkesan bersih, nyaman, wangi dan segar karena menggunakan AC di dalamnya.

Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar tradisional juga terlihat dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semangat pemerintah untuk perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional telah dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta penjabaran teknisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor: 53/M-DAG/PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Kedua peraturan tersebut merupakan pengesahan dari semangat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### 3. Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Pasar Tradisional

Sistem kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (dalam Wahyono,2015), sedikitnya terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen pertama: kebijakan publik (*public policies*), komponen kedua: stakeholders kebijakan (*policy stakeholders*), dan komponen ketiga: lingkungan kebijakan (*policyenvironment*).



Elemen kebijakan publik

Gambar 1.1 Komponen Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policies*) yang merupakan isi kebijakan itu sendiri (*policy content*) terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespon berbagai masalah publik (publik issues) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan semacamnya. Tingkat ketepatan keputusan sebuah kebijakan tergantung pada ketepatan dalam merumuskan masalah publik yang ingin dipecahkan. Tujuan kebijakan publik menurut Rahmat Hidayat (2015) adalah Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan.

Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk :

- Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
  - Melindungi hak-hak masyarakat
  - Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
  - Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
4. New Public Management dalam Pengelolaan Pasar Tradisional

<sup>12</sup> New Public management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management. NPM dipahami sebagai privatisasi s<sup>12</sup>uh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

Prinsip New Public Management (by Hood, 1991)

- a) Lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan.
- b) <sup>15</sup>anya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja yang dicapainya.
- c) Penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil (output), bukan pada prosedur.
- d) Pergeseran kearah adanya tingkat persaingan yang lebih besar didalam sektor pelayanan publik.
- e) Penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana yang dipraktikan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan kinerja pelayanan publik.
- f) Adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit organisasi yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik. Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parsimony dalam penggunaan sumber daya.

5. Pemerintah Daerah Sebagai Pemangku Kebijakan

Keberadaan pemerintahan pada hakekatnya dimaksudkan untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat,

sekaligus meningkatkan kesejahteraan atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah pelayanan umum. Menurut Lonsdale (Endang Wirjatmi TL, 1996:9 “Pelayanan umum adalah sesuatu yang disediakan baik oleh organisasi pemerintah atau swasta, karena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dilakukan untuk seluruh masyarakat guna kesejahteraan sosial”

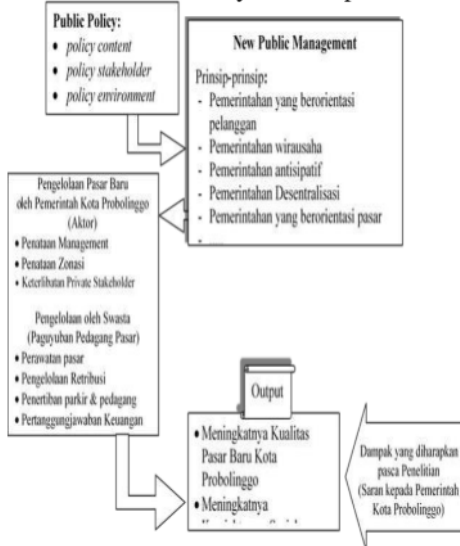
Profesionalisme birokrasi yang dituntut oleh good governance tidak terbentuk dengan sendirinya. Haruslah ada upaya sadar untuk mewujudkannya yang seringkali menempuh proses yang panjang. Beberapa strategi dapat disebutkan disini (Tjokrowinoto, 2001:18) :

1. Role Modelling. Sebagaimana disebutkan, standar perilaku dan pola perilaku birokrat terbentuk antara lain melalui keteladanan. Oleh karena itu sikap elite akan amat menentukan sosok profesionalisme birokrasi.
2. Rekrutmen, kondisi kerja dan pelatihan. <sup>3</sup>roses rekrutmen yang obyektif, kondisi kerja yang kondusif, dan pelatihan menggunakan methodik dan dedaktik yang tepat merupakan wacana pembentukan profesionalisme yang efektif.
3. Pendekatan proses belajar. Learning process approach sebagaimana dikemukakan David <sup>5</sup>orten merupakan wacana yang efektif bagi pembentukan profesionalisme ini. Pendekatan ini memberi margin toleransi yang besar bagi birokrasi untuk berbuat kesalahan (embracing error) dalam proses pembentukan dan <sup>5</sup>nyempurnaan profesionalisme karena <sup>5</sup>salah akan menjadi input untuk perbaikan <sup>5</sup>ri. Melalui kesalahan tadi, birokrat akan <sup>5</sup>lajar efektif (learning to be effective), dan dari sana akan melangkah menuju belajar <sup>5</sup>isien (learning to be efficient), dan pada akhirnya belajar berkembang (learning to be <sup>3</sup>pand).
4. Pembentukan profesionalisme bagi pengembangan sumber daya birokrasi harus dilakukan secara bersama-sama dengan <sup>3</sup>nguatan Organisasi (organizational strengthening) yang memfokuskan diri pada



24 tem manajemen untuk meningkatkan kinerja pada struktur mikro dan reformasi kelembagaan (institutional reform) yang memfokuskan diri pada struktur makro kelembagaan.

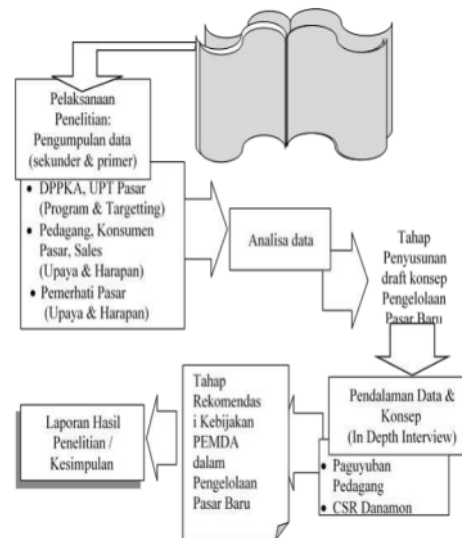
5. Last but not least, pembentukan profesionalisme memerlukan kontrol sosial dari masyarakat sipil. Meskipun nampaknya merupakan kontradiksi, di satu sisi profesionalisme birokrasi menuntut kemampuan empowering masyarakat sipil melalui pembentukan enabling social setting, namun disisi lain, masyarakat sipil perlu melakukan kontrol sosial terhadap birokrasi. Hal ini menuntut mutual learning proses antara birokrat dan masyarakat sipil.



## 9 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 10 pendekatan fenomenologi. Penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologi merupakan penelitian yang mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman 11 hidup yang terkait dengan fenomena tersebut. Creswell (2014) menyatakan bahwa studi fenomenologis mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup

mereka terkait dengan konsep atau fenomena. Jenis penelitian ini sesuai dengan fenomena yang berkembang di masyarakat bahwasannya pasar tradisional khususnya pasar Baru kota Probolinggo semakin tidak nyaman bagi pedagang dan pengunjung atau pembeli serta masyarakat pengguna jalan protokol sekitar pasar Baru.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo

Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam Penyediaan Sarana Prasarana Pasar Baru Probolinggo Dari hasil berdasarkan berbagai data sekunder, wawancara dan pengamatan lokasi diketahui bahwa pemerintah Probolinggo sebagai pembuat kebijakan yang berwenang mengelola pasar sebagai sebuah lembaga perekonomian publik yang 22 sarana pasar Baru pasar tradisional, yang dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 Perdagangan disebut dengan Rakyat, pemerintah kota Probolinggo melalui Unit Pelaksana Teknis Pasar Baru telah menyediakan beberapa sarana. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam Pembentukan Kelembagaan bagi Pedagang Pasar Baru Kota Probolinggo. UPT Pasar Baru telah memfasilitasi terbentuknya beberapa organisasi informal di dalam pasar yang antar lain :

- a) Paguyuban Pedagang pasar Baru

Kota Probolinggo Terbentuknya organisasi yang beranggotakan para pedagang pasar Baru yang kemudian disebut dengan paguyuban pedagang pasar Baru ini didasarkan pada SK Kepala UPT Pasar Baru Kota Probolinggo Nomor:

188/35a/KEP/425.110.1/2016 Tentang Susunan Kepengurusan paguyuban pedagang pasar Baru di kota Probolinggo Tahun 2016

b) Bank Sampah Pasar Baru

Pembentukan bank sampah di pasar Baru merupakan salah satu hasil musyawarah dari pengurus paguyuban pedagang pasar Baru dan menjadi salah satu kegiatan nyata dari paguyuban untuk menyukseskan terpeliharanya kebersihan pasar. Fasilitasi terbentuknya bank sampah ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan kebersihan pasar Baru. Dengan adanya bank sampah ini harapan pemerintah kota Probolinggo para pedagang pasar Baru semakin termotivasi kepeduliannya dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar.

c) Radio Land Pasar Baru

Radio Land adalah sebuah sistem penyiaran informasi dan hiburan melaluistudio sederhana layaknya sebuah stasiun radio. Radio Land ini sangat efektif sebagai sarana menyampaikan program-program yang diadakan oleh paguyuban pedagang, pemerintah maupun program-program kegiatan lainnya sehingga dapat mempercepat sampainya informasi kepada seluruh pedagang dan khalayak pasar. Beberapa pedagang juga menyatakan bahwa keberadaan radioland pasar Baru dapat dijadikan sebagai sarana curhat dan memperoleh informasi cepat dari paguyuban ataupun dari pemerintah.

2. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo

Public Policy dalam Pengelolaan Pasar Baru Kota Probolinggo. Dalam upaya memberdayakan pasar Baru kota Probolinggo, pemerintah melakukan beberapa kebijakan yang antara lain penyediaan fasilitas atau utility, revitalisasi fisik dan non fisik serta pembentukan wadah-wadah komunikasi yang berbentuk organisasi informal. Upaya

pembentukan organisasi organisasi informal seperti paguyuban pedagang pasar Baru, pembentukan bank sampah oleh paguyuban pedagang pasar serta pendirian Radio Land Suara Pasar yang juga merupakan produk kegiatan paguyuban pedagang pasar Baru tersebut merupakan salah satu wujud implementasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Probolinggo. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan adanya tiga komponen kebijakan publik yang diungkapkan oleh Dunn (dalam Wahyono, 2015), yaitu isi kebijakan (policy content), stakeholders kebijakan (policy stakeholders), dan lingkungan kebijakan (policy environment).

Alur Pembuatan kebijakan Pengelolaan Pasar Baru Kota Probolinggo



New Public Management dalam Pengelolaan Pasar Baru Kota Probolinggo Penerapan lima prinsip NPM dalam konteks pengelolaan pasar Baru kota Probolinggo oleh pemerintah kota Probolinggo :

- Korelasi dibentuknya Paguyuban Pedagang Pasar Baru dengan prinsip Pemerintahan yang Berorientasi Pelanggan pada New Public Management. Terwujudnya kepuasan pelayanan akan dapat tercapai jika aspirasi masyarakat berupa usulan keinginan, kebutuhan dan pendapatnya tentang pengelolaan pasar Baru oleh UPT Pasar yang disalurkan melalui wadah paguyuban pedagang pasar Baru dapat dipenuhi dan diwujudkan oleh pemerintah kota Probolinggo sehingga tercapai kesejahteraan para pedagang dan pelanggan pasar yang ada.
- Korelasi dibentuknya lembaga Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo dengan ke-5 Prinsip New Public Management; Terkait dengan pembentukan bank sampah oleh

paguyuban pedagang pasar, pemerintah kota Probolinggo telah memosisikan diri sebagai Pemerintahan yang Berorientasi Pelanggan, yang merupakan salah satu prinsip pelaksanaan dari New Public Management, dimana manfaat dari pengelolaan sampah dapat dinikmati hasilnya oleh pemilik sampah itu sendiri yaitu para pedagang pasar sebagai penghasil sampah sekaligus pihak yang menikmati dampak positif dari bersihnya lingkungan pasar karena termotivasi adanya keuntungan ekstra dari pengelolaan sampah melalui bank sampah yang telah menjadi jembatan bagi para pedagang dalam memanfaatkan sampah yang ada.

- c) Korelasi dibentuknya Radio Land Suara Pasar Baru dengan ke-5 Prinsip New Public Management Sebagai upaya menyediakan media penyebaran informasi baik informasi yang berasal dari pemerintah daerah maupun informasi yang bersifat internal komunitas pedagang pasar Baru, maka dibentuklah Radio Land Suara Pasar Baru yang dilahirkan dari hasil musyawarah pengurus paguyuban pedagang pasar Baru kota Probolinggo. Secara umum keberadaan Radio Land khusus untuk para pedagang dan pengunjung pasar tradisional ini sangat baik. Bahkan di salah satu pasar tradisional telah dijadwalkan adanya siaran khusus pencerahan rohani yang dilaksanakan secara bekerjasama dengan salah satu organisasi masyarakat yang dengan sukarela memberikan bantuan yang dikemas dalam bentuk suatu acara radio dengan judul Berdagang sambil Ngaji yang berisi Ceramah Agama Islam dan tanya jawab permasalahan perdagangan yang dialami oleh para pedagang pasar ditinjau dari sudut pandang Agama Islam.

### 3. Solusi Kebijakan Kemitraan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Probolinggo

#### a. Renovasi Fisik Bangunan

Terkait dengan kurang sinkronnya antara fakta hasil tatakelola kondisi pasar dengan pendapatan retribusi maka beberapa pihak merasa perlu adanya langkah konkrit yang lebih paripurna dalam pemberdayaan pasar

tradisional khususnya pasar Baru yaitu dengan melakukan renovasi fisik pasar. Renovasi fisik pasar Baru yang dikehendaki oleh berbagai pihak adalah dalam wujud mengubah tata ruang pasar, baik tata ruang penempatan los atau lapak pedagang maupun tata ruang parkir yang terpadu, misalnya berada di lantai dasar, sehingga kemacetan lalu lintas di jalan protokol bisa teratasi dan lalu lintas bongkar muat barang lebih nyaman. Jika perlu justru dibangun eskalator dari lantai dasar ke lantai berikutnya sehingga meringankan para pedagang mengangkut barang ke atas. Pada dasarnya banyak pihak menginginkan tata ruang lingkungan pasar Baru yang lebih terintegrasi dan membuat semua pihak lebih nyaman baik dalam berdagang maupun berbelanja. Ketersediaan tempat penampungan sampah sementara ini tentu terkait erat dengan desain fasilitas bangunan fisik pasar yang belum mengantisipasi volume sampah yang ternyata sangat banyak. Maka dari itu sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan renovasi fisik bangunan dengan mendesain ulang pasar Baru yang bisa mengakomodir volume sampah, jumlah pedagang dan penataan lokasi parkir yang integratif dan representatif.

#### b. Penataan dan Penertiban Perparkiran

Penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir, baik oleh kendaraan roda enam, roda empat, roda tiga, becak dan roda dua (sepeda motor dan sepeda) memang tidak bisa dielakkan karena jumlah kendaraan yang sangat banyak akibat dari banyaknya pedagang dan pengunjung pasar yang memarkir kendaraannya baik saat bongkar muat barang dagangan maupun.

para pengunjung yang sedang berbelanja di pasar Baru. Selain itu juga disebabkan karena lahan khusus parkir tidak disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan pertimbangan kondisi demikian maka sudah saatnya dilakukan renovasi fisik pasar yang didesain dapat mengakomodasi perparkiran sehingga permasalahan kesemrawutan lalu lintas dan



perparkiran dapat teratasi secara komprehensif.

c. Penertiban Pedagang di Luar Pasar

Dari data primer diperoleh 83 pedagang yang masih menempati tepi jalan akses dan pinggir pasar. Mereka sebagian besar berada di sepanjang trotoar sisi Barat dan Utara pasar Baru. Sebagiannya menempati tepi kiri dan kanan pintu masuk dan lorong dalam pasar. Pedagang yang berada di sisi barat dan sisi utara pasar Baru sudah barang tentu berada di depan toko. pedagang yang di depan toko ini tentu mengganggu lalu lintas pengunjung pasar atau pembeli yang akan memasuki pasar dan merugikan toko yang ada di sisi barat dan sisi utara tersebut karena pembeli cenderung menghindari kerumunan pedagang tak berlapak ini. Dengan demikian pemilik toko merasa dirugikan oleh keberadaan pedagang tersebut. Selain merugikan toko tersebut, pedagang yang tidak memiliki tempat permanen ini juga merugikan para pedagang di dalam pasar yang resmi memiliki lapak dan telah membayar retribusi sewa lapak di dalam pasar secara rutin. Karena jenis dagangan yang diajakan sama dengan dagangan yang dijual oleh pedagang yang ada di dalam pasar. Adanya luberan pedagang pasar yang berjualan di luar pasar ini sudah sering disampaikan oleh para pedagang anggota paguyuban pedagang pasar Baru, namun kenyataannya hingga sekarang masih belum terselesaikan.

Hal ini tentunya menjadi kesenjangan yang tak berujung, karena dalam pertemuan sering di bahas namun kenyataannya tidak ada solusi realistis yang sesuai dengan harapan pedagang yang telah disampaikan pada setiap kali pertemuan dan solusinya belum dapat dirasakan oleh para anggota paguyuban pedagang pasar karena masih tetap banyak pedagang di luar pasar.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pemerintah Daerah Kota Probolinggo masih perlu membuat kebijakan alternatif sebagai solusi dalam pengelolaan Pasar Baru di Kota Probolinggo. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah

Kota Probolinggo dalam pengelolaan Pasar Baru sebenarnya sudah dilaksanakan baik tentang pembangunan fisik pasar maupun non fisik pasar, akan tetapi beberapa permasalahan dalam pengelolaan pasar baru masih belum terselesaikan dengan baik karena masih adanya kondisi pasar yang masih kumuh atau becek saat musim hujan, parkir dan jalan sekitar pasar masih semrawut dan banyaknya pedagang yang berada di luar pasar untuk menjual dagangannya. Pemerintah Daerah Kota Probolinggo perlu mewujudkan harapan masyarakat, pedagang dan warga pasar demi mensejahterakan mereka dengan melibatkan pengelolaan pasar tradisional tersebut dengan pihak swasta yaitu paguyuban pedagang pasar. Perubahan pengelolaan pasar tradisional ini sangat mendesak yang diawali dengan revitalisasi baik bangunan fisik dan non fisik serta arsitektur tata letak pasar sehingga tampang fisik gedung layaknya pasar modern agar pengunjung atau konsumen betah untuk berada di pasar baru. Pelibatan paguyuban pedagang pasar dimaksudkan untuk segera mengatasi permasalahan yang belum teratasi sehingga segera menjadikan pasar tradisional menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam berbelanja sehingga diharapkan dapat bersaing secara sehat dengan pasar modern. Solusi ini sesuai dengan model NPM dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan pasar tradisional sebagai wujud pemerintahan yang menjalankan prinsip wirausaha. Sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan penelitian ini bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan solusi pengelolaan pasar tradisional kepada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, maka peneliti memberikan saran hendaknya pemerintah Kota Probolinggo segera melakukan revitalisasi bangunan secara menyeluruh. Revitalisasi fisik dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan performan pasar tradisional pasar Baru memiliki profil sebagaimana pasar swalayan modern. Dalam penataan ulang bangunan fisik Pemerintah Kota Probolinggo hendaknya memberikan ruang parkir yang cukup sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat sehingga memberikan efek nyaman kepada para pengunjung. Setelah dilakukan



renovasi fisik pasar seyogyanya pengelolaan pasar dilakukan oleh paguyuban pedagang pasar. Dalam pengelolaan tersebut paguyuban pedagang pasar melakukan pengelolaan retribusi sewa los, retribusi perparkiran, perawatan bangunan pasar, lingkungan, dan penertiban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afiff, Faisal. 2015. Kebijakan Bisnis. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- [2] Adi, Bawana. 2009. Perencanaan Pelayanan Perizinan Investasi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan. Malang: Universitas Brawijaya.
- [3] Badan Pusat Statistik. 2015. Kota Probolinggo Dalam Angka 2015. Kota Probolinggo: BPS.
- [4] BAPPEDA. 2012. Program Revitalisasi Pasar Baru kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo.
- [5] Kotler dan Lee, 2007. *Pemasaran di Sektor Publik*. PT. Indeks. Jakarta.
- [6] Mulyono, Agus. 2015. *Mengenal Kebijakan Publik*. Pusdiklat Kemenkeu. Jakarta.
- [7] Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- [8] Bungin, M Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenada Media Group.
- [9] Kosasih, 2014. Pasar Tradisional: Ruang Publik yang Makin Terpinggirkan. *Jurnal Ilmiah*, UPI Bandung.
- [10] Mairizon dan Kiswanto, 2013. Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Publik, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.
- [11] Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta.
- [12] Kasim, Azhar.-.Public Policy. Universitas Indonesia. Jakarta.

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.definisi-pengertian.com">www.definisi-pengertian.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://Repository.Unej.Ac.Id">Repository.Unej.Ac.Id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://workmsiclub.blogspot.com">workmsiclub.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://widyasari-press.com">widyasari-press.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.unpar.ac.id">repository.unpar.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://pasarcikijing.wordpress.com">pasarcikijing.wordpress.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	1%

10	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
12	<a href="https://administrasipublikblog.wordpress.com">administrasipublikblog.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://www.pendidikanekonomi.com">www.pendidikanekonomi.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	<1 %
15	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1 %
16	<a href="http://journal.ubb.ac.id">journal.ubb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://blowrian.wordpress.com">blowrian.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="https://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://infopublik.sijunjung.go.id">infopublik.sijunjung.go.id</a> Internet Source	



<1 %

22

[e-perpus.unud.ac.id](http://e-perpus.unud.ac.id)

Internet Source

<1 %

23

Supriyanto, Nurul Jannah Lailatul Fitria.  
"PENYULUHAN DAN SOSIALISASI SISTEM  
LAYANAN "PORTAL EMAS" PADA MAHASISWA  
UNIVERSITAS PANCA MARGA", Mafaza : Jurnal  
Pengabdian Masyarakat, 2022

Publication

<1 %

24

[journal.ipm2kpe.or.id](http://journal.ipm2kpe.or.id)

Internet Source

<1 %

25

[repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On